

Analisis Peran Pemerintah dalam Perekonomian Nasional melalui Tiga Fungsi Utama Fiskal: Alokasi, Distribusi, dan Stabilitas

Sendi Kurnia Putra

Ilmu Administrasi Negara, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Wahyu Setiani

Ilmu Administrasi Negara, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Dinda Astuti

Ilmu Administrasi Negara, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Wahjoe Pangestoe

Ilmu Administrasi Negara, Universitas Maritim Raja Ali Haji

Alamat: Jl. Raya Dompak, Dompak, Kec. Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang,

Kepulauan Riau 29115

Korespondensi penulis: skurniaputra@student.umrah.ac.id

Abstrak. This study analyzes the government's strategic role in the national economy through the three main functions of fiscal policy according to Richard A. Musgrave, namely the allocation, distribution, and stabilization functions. Using a descriptive qualitative approach and literature study method, this study highlights how fiscal policy is used to provide public goods and services, create social justice, and maintain economic stability. The study results show that the effectiveness of the implementation of these three functions still faces implementation challenges, such as fiscal constraints, uneven budget distribution, and global economic dynamics. This study emphasizes the importance of adaptive, transparent, and equitable fiscal governance in supporting sustainable national development.

Keywords: allocation function; distribution function; stability function; fiscal policy; role of government

Abstrak. Studi ini menganalisis peran strategis pemerintah dalam perekonomian nasional melalui tiga fungsi utama kebijakan fiskal menurut Richard A. Musgrave, yaitu fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan metode studi literatur, studi ini menyoroti bagaimana kebijakan fiskal digunakan untuk menyediakan barang dan jasa publik, menciptakan keadilan sosial, dan menjaga stabilitas ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas implementasi ketiga fungsi tersebut masih menghadapi tantangan implementasi, seperti keterbatasan fiskal, distribusi anggaran yang tidak merata, dan dinamika ekonomi global. Penelitian ini menekankan pentingnya tata kelola fiskal yang adaptif, transparan, dan adil dalam mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Kata Kunci: fungsi alokasi; fungsi distribusi; fungsi stabilitas; kebijakan fiskal; peran pemerintah

PENDAHULUAN

Perekonomian nasional merupakan sistem yang kompleks dan tidak dapat berjalan secara optimal tanpa adanya peran aktif dari pemerintah. Dalam konteks administrasi negara, pemerintah tidak hanya sebagai regulator, tetapi juga sebagai pelaku ekonomi yang memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Salah satu instrumen utama yang digunakan untuk menjalankan peran tersebut adalah kebijakan fiskal. Kebijakan ini berfungsi sebagai alat intervensi negara dalam mengelola arus pendapatan dan pengeluaran demi mencapai tujuan pembangunan ekonomi (Mujasmara, Panggabean, Muliana, Nugrahadi, & Rinaldi, 2023).

Kebijakan fiskal merupakan bagian penting dari perencanaan dan pengelolaan keuangan negara yang diarahkan untuk mengatur stabilitas ekonomi, menciptakan keadilan sosial, serta mendorong efisiensi dalam penyediaan layanan publik. Dalam teori keuangan publik, Richard A. Musgrave membagi peran fiskal pemerintah ke dalam tiga fungsi utama, yakni fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Ketiga fungsi ini secara teoritis dan praktis menjadi pilar dasar dalam pelaksanaan kebijakan fiskal di berbagai negara, termasuk Indonesia (Magadhendra, Soebagyo, & Hasmarini, 2024).

Fungsi alokasi merujuk pada upaya pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa publik yang tidak dapat secara efisien diproduksi oleh sektor swasta (Murdaya & Syahril, 2022). Contohnya adalah pembangunan jalan, sekolah, rumah sakit, dan berbagai bentuk infrastruktur lainnya yang dibutuhkan masyarakat secara luas. Pemerintah bertindak sebagai penyedia utama kebutuhan dasar masyarakat melalui perencanaan anggaran yang bersumber dari penerimaan negara, seperti pajak. Dalam perspektif administrasi publik, ini mencerminkan fungsi pelayanan pemerintah yang harus dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Fungsi distribusi berfokus pada penciptaan keadilan dalam pemerataan pendapatan dan kesempatan ekonomi (Arief, 2018). Melalui kebijakan fiskal, pemerintah berupaya menekan ketimpangan sosial yang terjadi antar kelompok masyarakat maupun antar wilayah. Misalnya, dengan memberikan bantuan sosial, subsidi, serta menerapkan sistem perpajakan yang progresif. Peran ini menjadi sangat penting di negara berkembang seperti Indonesia, yang masih menghadapi persoalan kesenjangan ekonomi yang cukup tajam, baik antara kota dan desa maupun antara kelompok kaya dan miskin.

Fungsi stabilisasi memainkan peran krusial dalam menjaga kestabilan ekonomi nasional. Pemerintah harus mampu merespons setiap gejolak ekonomi, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, dengan kebijakan yang tepat (Kartika, 2024). Ketika terjadi krisis ekonomi, inflasi tinggi, atau lonjakan pengangguran, pemerintah dapat menggunakan instrumen fiskal seperti stimulus anggaran atau belanja negara untuk menahan dampak negatif dan menjaga daya beli masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi stabilisasi tidak hanya berdampak ekonomi, tetapi juga menjadi bentuk perlindungan sosial dari negara kepada warganya.

Dalam praktiknya, ketiga fungsi fiskal tersebut telah diintegrasikan ke dalam perencanaan dan pelaksanaan APBN dan APBD setiap tahun. Namun, efektivitas pelaksanaannya sering kali mengalami hambatan di tingkat implementasi. Permasalahan klasik seperti rendahnya serapan anggaran, ketidaksesuaian program dengan kebutuhan masyarakat, hingga lemahnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah masih menjadi tantangan yang harus diatasi. Administrasi publik yang adaptif, partisipatif, dan berbasis kinerja sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan fiskal di Indonesia (Dewi & Lutfi, 2025).

Di sisi lain, dinamika eksternal seperti pandemi COVID-19, konflik geopolitik, dan volatilitas harga komoditas global menuntut kebijakan fiskal yang lebih responsif dan fleksibel. Pemerintah tidak cukup hanya dengan menyusun kebijakan yang baik secara normatif, tetapi juga harus mampu menyesuaikan pelaksanaannya dengan kondisi riil yang berubah dengan cepat. Dalam konteks ini, peran birokrasi publik sebagai pelaksana kebijakan menjadi sangat strategis dan menentukan keberhasilan fungsi-fungsi fiskal tersebut (Effendi, Anggrie, Oktofa, & Harahap, 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif peran pemerintah Indonesia dalam perekonomian nasional melalui pelaksanaan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran utuh mengenai efektivitas kebijakan fiskal dalam mendukung pembangunan nasional yang berkeadilan

dan berkelanjutan, serta menjadi referensi akademik dalam penguatan kapasitas administrasi negara dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan publik secara lebih optimal.

KAJIAN TEORITIS

1. Tiga Fungsi Pemerintah

Richard A. Musgrave, seorang ahli ekonomi publik terkemuka, mengemukakan bahwa pemerintah memiliki tiga fungsi utama dalam perekonomian, yakni fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi alokasi berkaitan dengan peran pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa publik yang tidak dapat disediakan secara optimal oleh mekanisme pasar, seperti jalan, pertahanan, pendidikan, dan kesehatan. Kegagalan pasar, seperti eksternalitas dan barang publik, membuat campur tangan pemerintah menjadi penting untuk mencapai efisiensi dan keadilan dalam penyediaan layanan dasar bagi masyarakat.

Fungsi distribusi menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menciptakan pemerataan pendapatan dan kekayaan di antara seluruh lapisan masyarakat. Ketimpangan ekonomi yang tinggi dapat menimbulkan instabilitas sosial dan ekonomi, sehingga diperlukan kebijakan fiskal yang bersifat redistributif, seperti sistem pajak progresif, subsidi untuk kelompok rentan, serta program bantuan sosial. Dengan mekanisme ini, pemerintah dapat memastikan bahwa manfaat pembangunan dirasakan secara lebih merata dan tidak hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu.

Fungsi stabilisasi berhubungan dengan upaya pemerintah menjaga kestabilan ekonomi makro dari ancaman inflasi, pengangguran, dan resesi. Melalui instrumen fiskal seperti pengaturan belanja negara dan perpajakan, pemerintah dapat mengatur permintaan agregat dan menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Dalam kerangka ini, kebijakan fiskal bersifat counter-cyclical, artinya belanja ditingkatkan saat ekonomi melemah dan dikurangi saat ekonomi memanas. Dengan menjalankan ketiga fungsi ini secara efektif, pemerintah berperan strategis dalam menciptakan perekonomian nasional yang seimbang, inklusif, dan berkelanjutan.

2. Penelitian Terdahulu

Berbagai penelitian terdahulu telah membuktikan bahwa fungsi-fungsi fiskal pemerintah memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan ekonomi nasional. Penelitian oleh (Nurkodri, Amir and Zamzami (2023), menunjukkan bahwa dana perimbangan dan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Jambi secara signifikan mendorong belanja modal, meskipun belum sepenuhnya berdampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja. Di sisi lain, Vitara Agatha and Uliansyah (2021) menemukan bahwa desentralisasi fiskal berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan di Provinsi Papua, terutama ketika pertumbuhan ekonomi berperan sebagai variabel mediasi. Penelitian ini menyoroti pentingnya peran alokasi dan distribusi dalam konteks fiskal daerah. Sementara itu, Nabilah and Addainuri (2025) menekankan bahwa kebijakan fiskal yang difokuskan pada sektor infrastruktur dan industri mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga secara nasional.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Hardiyanti et al., (2024) mengungkapkan bahwa belanja sosial dan pajak daerah memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap tingkat ketimpangan pendapatan, menegaskan efektivitas fungsi distribusi dalam mengurangi disparitas ekonomi. (Husen, Hasyim, & Yunus, 2024) melalui studi kasus di Halmahera Selatan menunjukkan bahwa optimalisasi ketiga fungsi fiskal alokasi, distribusi, dan stabilisasi berkorelasi dengan peningkatan kinerja APBD dan efektivitas pembangunan daerah. Temuan temuan ini secara umum memperkuat asumsi bahwa peran pemerintah melalui kebijakan fiskal sangat vital dalam mewujudkan pemerataan, efisiensi, dan stabilitas ekonomi di tingkat nasional maupun daerah.

METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggabungkan metode penelitian kepustakaan dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena dapat memberikan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai fenomena peran pemerintah dalam perekonomian nasional, khususnya melalui tiga tugas utama kebijakan fiskal - alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Tanpa harus terjun langsung ke lapangan, pendekatan ini memungkinkan para peneliti untuk memeriksa dan membandingkan berbagai data sekunder dan literatur yang telah tersedia sebelumnya. Menurut (Mukaromah, 2023) dalam Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial, studi literatur adalah cara yang berguna untuk memeriksa kebijakan ekonomi makro yang dikeluarkan pemerintah dengan menggunakan data dari dokumen resmi dan penelitian ilmiah yang relevan.

Dengan menggunakan metode ini, studi ini berusaha memberikan pemahaman konseptual dan teoritis tentang bagaimana peran fiskal negara diimplementasikan untuk mengatasi masalah yang dihadapi perekonomian nasional.

2. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari publikasi ilmiah dan lembaga pemerintah. Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, dan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan sumber data utama. Data juga dikumpulkan dari buku-buku dan studi kebijakan, serta jurnal ilmiah nasional dan internasional yang berkonsentrasi pada isu-isu fiskal dan ekonomi. Dokumentasi digunakan untuk melaksanakan strategi pengumpulan data, termasuk mengumpulkan, memilih, dan mendokumentasikan berbagai jenis informasi yang berkaitan dengan topik penelitian.

Untuk menjelaskan efektivitas kebijakan fiskal di masa pandemi, penelitian (Hanifa & Fisabilillah, 2021) dalam jurnal Welfare: Journal of Economics menggunakan data dari Kementerian Keuangan dan BNPB. Ini adalah contoh penggunaan pengumpulan data sekunder. Lebih lanjut, laporan APBN dan publikasi kementerian menjadi dasar analisis efisiensi belanja negara dalam mendorong pemulihan ekonomi dalam jurnal Strategi Pemulihan Ekonomi Pasca Pandemi (2024). Semua informasi ini dikumpulkan untuk menjamin bahwa analisis tersebut secara akurat menggambarkan keadaan empiris yang nyata dan dapat diandalkan.

3. Teknik Analisis Data

Teknik analisis deskriptif-kualitatif digunakan untuk memeriksa data yang diperoleh. Dengan penekanan pada makna dan pola tematik yang berkaitan dengan fungsi anggaran pemerintah, teknik ini digunakan untuk menginterpretasikan data secara menyeluruh. Analisis dilakukan melalui tiga proses dasar, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Informasi yang dianggap paling relevan dengan fokus penelitian-aplikasi fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dalam kebijakan fiskal nasional-dipilih untuk tahap reduksi data. Selain itu, data yang telah direduksi disajikan secara naratif dan tematik untuk menunjukkan bagaimana pemerintah merespons berbagai isu ekonomi dengan menjalankan ketiga fungsi fiskal tersebut.

Kerangka teori Richard Musgrave, yang berfungsi sebagai dasar untuk memahami fungsi fiskal dalam ekonomi publik, dikaitkan dengan data empiris untuk menarik kesimpulan. Analisis semacam ini sebanding dengan analisis yang digunakan dalam jurnal IQTISHOD (2024), yang menggunakan pendekatan teoritis dan tinjauan literatur untuk menyelidiki fungsi distribusi fiskal dari perspektif ekonomi Islam. Selain itu, teknik deskriptif-kualitatif digunakan dalam publikasi Strategi Pemulihan Ekonomi Indonesia Pasca-Pandemi (2024) untuk memberikan studi tentang realitas APBN dalam kaitannya dengan alokasi sumber daya. Untuk menggambarkan bagaimana

pemerintah Indonesia mengelola perekonomian negara melalui kebijakan fiskal yang cerdas dan fleksibel, metode analisis ini dianggap relevan dan sesuai

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peran Pemerintah dalam Menjalankan Fungsi Alokasi untuk Penyediaan Barang dan Jasa Publik secara Efisien

Pemerintah memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi alokasi fiskal. Dengan menjamin penyediaan barang dan jasa publik seperti jalan, jembatan, layanan kesehatan, dan pendidikan, pemerintah memenuhi perannya dalam alokasi fiskal. Sektor swasta biasanya menahan diri untuk tidak menyediakan hal-hal tersebut karena biasanya tidak memberikan keuntungan finansial secara langsung. Pada titik ini, peran negara menjadi penting untuk memastikan bahwa setiap orang, bahkan mereka yang kurang mampu, memiliki akses terhadap layanan-layanan penting ini. Akses terhadap fasilitas umum akan sangat terbatas jika tidak ada keterlibatan pemerintah. Pada akhirnya, hal ini dapat menghambat kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, selain komponen ekonomi, peran pembagian fiskal juga menunjukkan komitmen negara untuk mencapai keadilan sosial dan pertumbuhan yang inklusif.

Menurut (Syafiqoh, 2025), dalam perspektif ekonomi Islam, negara tidak hanya berfungsi sebagai pengatur, tetapi juga memiliki kewajiban moral dan syar'i untuk menyediakan kebutuhan dasar masyarakat demi mencapai kemaslahatan bersama. Dalam sistem modern, fungsi ini dijalankan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang berperan sebagai alat fiskal utama untuk mengalokasikan dana ke sektor-sektor prioritas. Seperti disampaikan oleh (Shafitri, Nur Ratman, Putri Jufani, Wela Aliza, & Pangestoeti, 2025) efektivitas alokasi sangat bergantung pada transparansi dan akuntabilitas pengelolaan APBN, sehingga penggunaan dana publik dapat tepat sasaran dan efisien.

Selain itu, alokasi anggaran yang tepat dapat menimbulkan efek pengganda, yaitu mendorong peningkatan pendapatan, konsumsi, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (Oktivany, Agustria, & Tika, 2024) menekankan bahwa proyek-proyek pemerintah seperti infrastruktur dan subsidi dapat menstimulasi aktivitas ekonomi jika dijalankan dengan perencanaan dan distribusi yang tepat. Namun, agar alokasi anggaran efisien, pemerintah perlu mengatasi hambatan seperti birokrasi lamban dan data yang belum akurat. Solusinya adalah lewat digitalisasi, evaluasi rutin, dan keterlibatan publik untuk memastikan layanan publik mendukung keadilan sosial dan pembangunan inklusif. Namun, agar alokasi anggaran efisien, pemerintah perlu mengatasi hambatan seperti birokrasi lamban dan data yang belum akurat. Solusinya adalah lewat digitalisasi, evaluasi rutin, dan keterlibatan publik untuk memastikan layanan publik mendukung keadilan sosial dan pembangunan inklusi.

2. Fungsi Distribusi Kebijakan Fiskal dalam Mengurangi Kesenjangan Sosial dan Ekonom

Fungsi distribusi kebijakan fiskal sangat penting dalam upaya pemerintah untuk mengurangi ketimpangan ekonomi dan sosial. Melalui instrumen seperti pajak progresif, subsidi, dan program perlindungan sosial, kebijakan-kebijakan ini bertujuan untuk mengalihkan pendapatan dan kekayaan dari kelompok masyarakat yang lebih mampu ke kelompok masyarakat yang kurang mampu. Mengingat tingkat ketimpangan yang tinggi di Indonesia, seperti yang ditunjukkan oleh variasi dalam Indeks Gini dan kesenjangan pembangunan antar wilayah, peran ini sangat penting bagi negara ini.

Menurut (Febrianti, Riovita, & Com, 2025) meskipun instrumen fiskal seperti pajak progresif dan belanja sosial memiliki potensi besar dalam menciptakan pemerataan pendapatan, efektivitasnya masih dibatasi oleh berbagai tantangan. Beberapa hambatan utama mencakup bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, sistem perpajakan yang lemah, tata kelola fiskal yang belum maksimal, serta sektor informal yang belum terintegrasi dalam sistem fiskal.

Selain itu, pendekatan distribusi fiskal yang cenderung berfokus pada pencapaian angka-angka makro dan laju pertumbuhan ekonomi masih belum mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat dalam mewujudkan keadilan sosial yang menyeluruh dan berkelanjutan. Seperti dijelaskan oleh (Nabilah & Addainuri, 2025a) dalam perspektif ekonomi Islam, kebijakan fiskal tidak hanya bertujuan menstabilkan ekonomi tetapi juga sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial dengan memperhatikan dimensi moral dan spiritual. Instrumen seperti zakat dan subsidi yang disalurkan secara tepat diyakini mampu membangun sistem ekonomi yang lebih adil, inklusif, dan berpihak pada kelompok rentan.

3. Efektivitas Fungsi Stabilisasi Kebijakan Fiskal dalam Menghadapi Krisis Ekonomi

Fungsi stabilisasi kebijakan fiskal sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional, terutama selama krisis seperti inflasi tinggi, resesi, atau gejolak internasional. Dengan menggunakan instrumen seperti keringanan pajak dan belanja negara, pemerintah dapat mempertahankan daya beli masyarakat, mendorong perekonomian, dan menjaga aktivitas ekonomi tetap berjalan (Hafizd, Janwari, & Al-Hakim, 2024) menyebut bahwa koordinasi antara kebijakan fiskal dan moneter terbukti efektif dalam merespons gejolak ekonomi serta menjaga harga dan nilai tukar tetap stabil.

Perencanaan yang tepat, pelaksanaan yang cepat, dan kolaborasi lintas sektor memastikan bahwa fungsi ini berjalan dengan baik. Belanja negara dan pajak dapat berdampak besar pada PDB dalam jangka pendek, tetapi dalam jangka panjang, pengawasan anggaran diperlukan untuk menghindari beban fiskal yang berlebihan. Akibatnya, pemerintah harus memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan fleksibel dan responsif terhadap perubahan ekonomi.

Selain pendekatan teknis, perspektif Islam juga menekankan peran stabilisasi kebijakan fiskal yang memastikan kesejahteraan sosial dan keadilan. Menurut (Britania, Septiani, Heru Ghibran, & Akhiruddin Siregar, 2024) kebijakan fiskal idealnya tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi, tetapi juga menjamin distribusi kekayaan yang adil serta melindungi kelompok rentan. Oleh karena itu, fungsi stabilisasi kebijakan fiskal berkaitan dengan aspek sosial dan moral dalam menjaga keseimbangan pembangunan nasional selain angka makroekonomi.

4. Tantangan yang Dihadapi Pemerintah dalam Mengimplementasikan Ketiga Fungsi Kebijakan Fiskal (Alokasi, Distribusi, dan Stabilisasi) Secara Seimbang dan Berkelanjutan

Untuk menjalankan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi kebijakan fiskal secara seimbang dan berkelanjutan, pemerintah Indonesia menghadapi banyak masalah, termasuk masalah teknis, struktural, dan sosial-ekonomi.

- a. Keterbatasan Ruang Fiskal dan Ketergantungan pada Utang. Biaya yang terbatas menghambat distribusi dan alokasi. Meskipun program kesejahteraan sosial, pembangunan infrastruktur, dan subsidi membutuhkan banyak dana, sumber daya fiskal tidak selalu cukup. Selain itu, jika pemerintah bergantung pada utang luar negeri, mereka tidak dapat mengatasi krisis atau kebutuhan mendesak lainnya dengan mudah.
- b. Distribusi Anggaran yang Tidak Merata. Salah satu masalah dalam fungsi distribusi adalah ketidakseimbangan anggaran antara pusat dan daerah. Program dana transfer seperti Dana

- Desa atau Dana Alokasi Umum (DAU) dirancang untuk mengurangi ketimpangan ini, tetapi mereka gagal karena kapasitas fiskal daerah yang rendah dan tata kelola yang buruk.
- c. Efisiensi dan Transparansi Pengelolaan Anggaran. Efisiensi dan transparansi juga menghalangi upaya stabilisasi fiskal. Jika belanja negara tidak dikelola dengan baik, itu berpotensi menyebabkan pemborosan dan bahkan meningkatkan ketimpangan sosial. Dalam hal ini, pemerintah harus melakukan reformasi anggaran dan membuat pelaporan dan evaluasi program lebih transparan.
 - d. Ketidakpastian Ekonomi Global Dinamika global seperti fluktuasi harga komoditas, inflasi, dan ketidakpastian geopolitik harus menjadi tantangan bagi pemerintah untuk menjalankan fungsi stabilisasi mereka. Tantangan ini berdampak langsung pada daya beli masyarakat, suku bunga, dan nilai tukar. Memang, APBN yang adaptif dan berfokus pada stabilitas makro telah dibuat oleh pemerintah, tetapi untuk menjaga ketahanan ekonomi domestik diperlukan pendekatan komprehensif.

KESIMPULAN

Melalui kebijakan fiskal, yang dilakukan melalui tiga fungsi utama - alokasi, distribusi, dan stabilisasi pemerintah memainkan peran penting dalam mengendalikan perekonomian nasional. Barang dan jasa publik yang tidak dapat disediakan oleh pasar disediakan secara efisien oleh fungsi alokasi. Dengan menggunakan bantuan sosial dan perpajakan, fungsi distribusi berusaha untuk menciptakan keadilan sosial. Sementara itu, fungsi stabilisasi berkontribusi dalam menjaga stabilitas ekonomi makro dalam menghadapi ketidakpastian dan krisis global. Terlepas dari pelaksanaan ketiga fungsi tersebut dalam kebijakan fiskal Indonesia, sejumlah kendala masih menghalangi keberhasilannya, termasuk kurangnya ruang fiskal, alokasi anggaran yang tidak merata, serta keterbukaan dan akuntabilitas anggaran yang tidak memadai. Dengan memperluas basis pajak dan mengelola utang secara hati-hati, pemerintah harus meningkatkan kemampuan fiskalnya. Peninjauan secara berkala juga harus meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan anggaran. Alokasi dana antar daerah harus lebih adil dan disesuaikan dengan kebutuhan lokal. Selain itu, agar lebih tepat sasaran dan berkelanjutan, kebijakan fiskal harus cukup fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan perubahan ekonomi global dan didukung oleh digitalisasi dan keterlibatan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, M. Z. (2018). Pengawasan Keuangan Negara Oleh Badan Pemeriksa Keuangan. *Jurnal Jendela Hukum*, 2(1), 57–67. <https://doi.org/10.24929/fh.v2i1.445>
- Britania, Y., Septiani, D., Heru Ghibran, M., & Akhiruddin Siregar, P. (2024). *PERAN KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER DALAM MENJAGA DAN MENCiptakan STABILITAS PEREKONOMIAN INDONESIA MENURUT PERSPEKTIF ISLAM*. 22(3).
- Dewi, F. S., & Lutfi, A. (2025). Jurnal Optimalisasi Administrasi Pajak Daerah Berbasis Data Spasial: Studi Implementasi Google Maps Pada Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Makanan dan Minuman di DKI Jakarta. *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 4(5). <https://doi.org/10.58344/locus.v4i5.4117>
- Effendi, N. A., Anggrie, S., Oktofa, M. A., & Harahap, M. I. (2023). Dampak Kebijakan Fiskal dan Moneter Pasca Pandemi Covid 19 Terhadap Harga Saham Di Indonesia.

EKSYA: Jurnal Ekonomi Syariah, 4(2), 297–309.

- Febrianti, A., Riovita, H., & Com, H. (2025). *Ekonodinamika Jurnal Ekonomi Dinamis EFEKTIVITAS INSTRUMEN EKONOMI PUBLIK DALAM MENGURANGI KETIMPANGAN PENDAPATAN*. Retrieved from <https://jurnalpedia.com/1/index.php/jed>
- Hafizd, J. Z., Janwari, Y., & Al-Hakim, S. (2024). Kebijakan Fiskal di Indonesia: Analisis Hukum Keadilan Ekonomi dan Implikasi bagi Pembangunan Berkelanjutan. *IQTISHOD: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 3(2), 146–167. <https://doi.org/10.69768/ji.v3i2.58>
- Hanifa, N., & Fisabilillah, L. W. P. (2021). Peran dan Kebijakan Pemerintah Indonesia di Masa Pandemi Covid-19. *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(1), 9–19. <https://doi.org/10.37058/wlfr.v2i1.2807>
- Hardiyanti, M. T., Arum, D. S., Hariaji, A., Hardyansah, R., Mardikaningsih, R., Sasmita, B., & Darmawan, D. (2024). *Analisis Pengetahuan tentang Donor Darah untuk Kesehatan di Kalangan Mahasiswa Universitas Sunan Giri Surabaya Analysis*. (4).
- Husen, A., Hasyim, A., & Yunus, R. A. (2024). EVALUASI PENYUSUNAN DAN ALOKASI ANGGARAN BELANJA. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Unkhair*, 15(1), 1–23.
- Kartika, R. (2024). Peran Kebijakan Fiskal Dan Moneter Dalam Perekonomian Indonesia Dari Hambatan Dan Upaya Penanggulangannya. *Journal of Economy, Business, Entrepreneurship And*, 4(1), 158–170. Retrieved from <http://ijebef.esc-id.org/index.php/home/article/view/146>
- Magadhendra, F., Soebagyo, D., & Hasmarini, M. I. (2024). *PENGARUH KEBIJAKAN FISKAL TERHADAP DEFISIT APBN DI INDONESIA TAHUN 2007-2022*. 18(1), 1255–1260.
- Mujasmara, F. D., Panggabean, R. T. T., Muliana, R. S., Nugrahadi, E. W., & Rinaldi, M. (2023). Peran Kebijakan Fiskal Terhadap Perekonomian di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 2986–2997. Retrieved from <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/6369>
- Mukaromah, H. (2023). *Analysis of Government Policy in Responding to the Economic Recession Due to Covid-19 in Indonesia*. Retrieved from <https://journal.civiliza.org/index.php/jess>
- Murdaya, J., & Syahril. (2022). ANALISIS PENGARUH DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP TINGKAT PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN SIMEULUE. *TRANSEKONOMIKA: AKUNTANSI, BISNIS DAN KEUANGAN*, 2(6), 245–254. <https://doi.org/10.55047/transekonomika.v2i6.293>
- Nabilah, I. Z., & Addainuri, M. I. (2025a). PERAN PEMERINTAH DALAM MENYEIMBANGKAN SUBSIDI SEBAGAI KEBIJAKAN FISKAL UNTUK MENDUKUNG PEREKONOMIAN TIGA SEKTOR. *JURNAL MANAJEMEN EKONOMI DAN BISNIS*, 1(2), 59–75.
- Nabilah, I. Z., & Addainuri, M. I. (2025b). *PEREKONOMIAN TIGA SEKTOR pada peran masing-masing sektor tetapi juga pada bagaimana arus pendapatan dan*.

1(2), 59–75.

- Nurkodri, M. S., Amir, A., & Zamzami. (2023). Analisis Pengaruh Dana Perimbangan Dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Jambi. *E-Jurnal Ekonomi Sumberdaya Dan Lingkungan*, 11(1), 29–38. Retrieved from <https://online-journal.unja.ac.id/JSEL/article/view/24104>
- Oktivany, C., Agustria, F., & Tika, S. (2024). *KONSEP KEBIJAKAN FISKAL PADA KONTEKS PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM*. <https://doi.org/10.58738/kendali.v2i1.122>
- Shafitri, A., Nur Ratman, M., Putri Jufani, A., Wela Aliza, S., & Pangestoeti, W. (2025). *Analisis Transparansi dan Akuntabilitas APBN dalam Pengelolaan Keuangan Negara: Pendekatan Studi Literatur*. 2(1). Retrieved from <https://yasyahikamatzu.com/index.php/hjm/about>
- Vitara Agatha, S., & Uliansyah, B. A. A. (2021). Pengaruh Desentralisasi Fiskal dalam Pengentasan Kemiskinan dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Variabel Mediasi di Provinsi Papua. *Jurnalku*, 1(3), 156–176. <https://doi.org/10.54957/jurnalku.v1i3.30>